

Rilis International Women's Day 2020

Badan Kerja Sama Antar Parlemen:

"Each for Equal: Kesetaraan Gender sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial"

Mengusung tema *"Each for Equal"*, *International Women's Day* tahun 2020 ini menggagaskan bahwa ketidaksetaraan gender bukanlah hanya masalah perempuan, tetapi juga ekonomi - karena kesetaraan gender sangat penting bagi ekonomi dan masyarakat untuk berkembang. *"Each for Equal"* sebagai simbol perubahan menekankan perlunya melibatkan wanita dalam inovasi teknologi, kesetaraan peluang, terwujudnya lingkungan kerja yang inklusif bagi wanita, dukungan bagi wanita untuk mendapatkan penghasilan, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan kesehatan, dan peningkatan kreativitas perempuan. Perayaan ini juga meningkatkan kesadaran akan bias dan menyerukan ketidaksetaraan, kampanye mengatakan, kita semua dapat membantu membawa perubahan.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0., kesetaraan gender, sebagaimana ditegaskan dalam *Sustainable Development Goal (SDG) 5*, juga mempunyai fokus terhadap *digital gender divide*. Dengan teknologi dan konektivitas digital yang cepat dan berkembang di Indonesia, ini menimbulkan pertanyaan apakah perempuan telah cukup berpartisipasi dalam perkembangan ini. Tantangan yang dihadapi perempuan dapat menjadi semakin kompleks, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari sektor publik dan swasta dalam memastikan kesejahteraan dan peluang yang adil bagi perempuan.

Peringatan *International Women's Day* tahun ini juga bertepatan dengan 25 tahun diadopsinya *Beijing Declaration and Platform for Action* di *Fourth World Conference on Women* di Beijing, Cina pada tahun 1995, yang dimana Indonesia bersama 189 negara anggota PBB lainnya menyepakati hal ini sebagai kerangka aksi pemberdayaan dan kemajuan perempuan, serta meningkatkan akses serta kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, PBB juga mempunyai tema *I am Generation Equality: Realizing Women's Rights*, yang dimana selaras dengan kampanye dari UN Women bernama *Generation Equality*, yang menandai peringatan 25 tahun diadopsinya *Beijing Declaration and Platform for Action*.

"Gender equality sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan beradab bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan konstitusi, utamanya dengan penekanan terhadap pemberdayaan dan kesetaraan peluang bagi perempuan dalam berbagai bidang", ungkap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon, S.S, M.Sc.

Dalam kesempatan ini, Dr. Fadli Zon juga mengapresiasi semakin meningkatnya jumlah anggota DPR perempuan periode 2019-2024, yakni 188 perempuan, dari total 575 anggota terpilih. Dengan demikian, persentase keterwakilan perempuan di DPR periode ini adalah sejumlah 20,5% dan hal ini tentu saja mendukung keberpihakan produk-produk legislasi yang dihasilkan DPR terhadap kaum perempuan. Perlu ditekankan bahwa DPR RI bertekad untuk menggunakan perannya untuk mencapai SDG 5.

DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, salah satunya yaitu melalui UU No. 16/2019 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Undang-undang ini tidak hanya dapat mencegah pernikahan anak, akan tetapi juga dampak yang dapat terjadi, seperti eksploitasi, dan kekerasan seksual dan domestik. UU ini patut disambut secara positif karena menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai *Beijing Declaration and Platform for Action* kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih meluas di dunia.

Selain itu, di dunia internasional, komitmen Indonesia diwujudkan dengan telah meratifikasi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) bersama-sama dengan 186 negara di dunia lainnya, yang diwujudkan melalui UU nomor 7 tahun 1984 yang menekankan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Saat ini, perempuan dan anak masih sering menjadi kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi yang berawal dari budaya patriarki dalam pemahaman superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini, DPR telah mengesahkan berbagai UU yang secara langsung berkontribusi pada upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan diantaranya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, UU Perlindungan Saksi Korban, dan UU Bantuan Hukum.

Diharapkan dengan diperingatinya *International Women's Day* setiap tahun, maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, baik di rumah, masyarakat, lingkungan kerja, dan berbagai sektor dimana perempuan berada. *Each for Equal* bukan hanya tanggungjawab perempuan, namun tentu saja kaum pria dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengakhiri segala bentuk diskriminasi, menghapuskan segala bentuk kekerasan, dan memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi.